



LKJIP 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2025*



Kirim Email Di Sini

dpmpdsp@lamongan.go.id



Kunjungi Laman Kami

<https://dpmpdsp.lamongankab.go.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1. Tugas DPMPTSP	2
2. Fungsi DPMPTSP.....	2
3. Struktur Organisasi DPMPTSP	2
C. DATA UMUM ORGANISASI.....	9
1. Personil	9
2. Sarana dan Prasarana	10
3. Pembiayaan	13
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
1. Visi Misi Kabupaten Lamongan	15
2. Tujuan	16
3. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	17
B. RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
A.1 Pencapaian Kinerja	24
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	25
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	27
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	29
A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan.....	30
A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja.	45
B. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV PENUTUP	51

A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	51
LAMPIRAN - LAMPIRAN	52
METRIK RENSTRA OPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026	57
PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2025	58
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	59
LAMPIRAN LAINNYA (Penghargaan)	61

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan

Lamongan, Februari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781204 201001 2 011

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan itu dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tugas dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan secara akuntabel sebagai alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun. Aturan teknis mengenai laporan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

2. Fungsi DPMPTSP

Selanjutnya berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan strategis; dan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

3. Struktur Organisasi DPMPTSP

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan nomor 78 Tahun 2023, tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana teknis Dinas

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

1. Perencanaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pembinaan administrasi dinas;
3. Pembinaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pembinaan pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal;
7. Pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretaris didalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan Rencana Strategis, Lakip, LPPD, LKPJ dinas;
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dibidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan Kerjasama dan penelitian;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan

dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian keuangan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- 3) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada

satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi

- 4) Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- 5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati

d. Tata Kerja :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi :
 - a. Wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan
 - b. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
 - c. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 4) Dalam menyampaikan laporan masing- masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

e. Pengisian Jabatan :

- 1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 1. Teknis
 2. Manajerial; dan
 3. Sosial kultural
- 4) Selain memenuhi kompetensi pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah juga harus memenuhi kompetensi pemerintahan
- 5) Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi
- 6) Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan
- 7) Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan
- 8) Kompetensi pemerintahan ada 4 :
 1. Kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi;
 2. Hubungan Pemerintah pusat dengan daerah, Pemerintah umum, dan pengelolaan keuangan daerah;
 3. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 5. Etika Pemerintahan.
- 9) Kompetensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan saat ini diantaranya adalah 53 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan status Kepegawaian, terdiri dari :

➤ Pegawai Negeri Sipil	:	18 orang
➤ Calon Pegawai Negeri Sipil	:	13 orang
➤ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	:	21 orang
➤ Tenaga Kerja Kontrak	:	1 orang
Jumlah	:	<u>53 orang</u>

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari :

➤ Laki-Laki	:	26 orang
➤ Perempuan	:	27 orang
Jumlah	:	<u>53 orang</u>

c. Jumlah Pegawai menurut golongan/ruang, adalah sebagai berikut :

➤ Golongan IV / a	:	5 orang
➤ Golongan IV / b	:	1 orang
➤ Golongan IV / c	:	1 orang
Jumlah	:	<u>7 orang</u>
➤ Golongan III / a	:	13 orang
➤ Golongan III / b	:	4 orang
➤ Golongan III / c	:	1 orang
➤ Golongan III / d	:	6 orang
Jumlah	:	<u>24 orang</u>

➤ Golongan IX	:	14 orang
➤ Golongan V	:	7 orang
Jumlah	:	<u>21 orang</u>

d. Jumlah Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan formal, adalah sebagai berikut:

➤ S2	:	9 orang
➤ S1 / D4	:	37 orang
➤ D3	:	-
➤ D2	:	-
➤ SMA / Sederajat	:	7 orang
➤ SMP / Sederajat	:	-
Jumlah	:	<u>53 orang</u>

e. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), adalah sebagai berikut :

➤ Diklatpim Tingkat II	:	-
➤ Diklatpim Tingkat III	:	1 orang
➤ Diklatpim Tingkat IV	:	5 orang
Jumlah	:	<u>6 orang</u>

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah (Unit)
1.	Gedung	4 Unit
2.	AC pendingin ruangan	22 buah
3.	Alat Ukur kesehatan	4 buah
4.	Baliho	25 buah
5.	Brangkas	2 buah
6.	Camera Digital	5 buah
7.	CCTV	2 unit 22 camera
8.	Dispenser	1 unit
9.	Faximile	1 unit
10.	Filling kabinet	23 buah
11.	Genset	1 unit
12.	Gudang	20 m2
13.	Handly talkies	4 unit
14.	Handycam	1 unit
15.	Jaringan komputer	1 unit
16.	Komputer	70 unit
17.	Komputer touchscreen	2 buah
18.	Kursi kerja pejabat eselon IV	4 buah
19.	Kursi rapat/lipat	60 buah
20.	Kursi tamu promosi	5 buah
21.	Kursi Kerja	15 buah
22.	Lap Top	16 buah
23.	LCD Proyektor	2 unit
24.	LED Informasi Perizinan	1 unit
25.	LED Running Teks	1 unit
26.	Lemari besi	11 buah
27.	Lemari kayu	5 buah
28.	Layar	1 unit
29.	Meja dan kursi pemohon izin	1 stel

30.	Meja dan kursi tamu pimpinan	2 set
31.	Meja kerja	34 stel
32.	Meja pelayanan	4 unit
33.	Meja rapat	8 buah
34.	Meja rapat di ruang pimpinan	1 set
35.	Meja tamu promosi	6 buah
36.	Meja tulis pemohon izin	1 set
37.	Mesin antrian	2 buah
38.	Mesin Foto Copy	1 unit
39.	Mesin Hitung	1 buah
40.	Mesin penghancur kertas	1 unit
41.	Mobil	6 buah
42.	Mushola	24 m2
43.	Neon box	3 unit
44.	Pesawat Telp	2 buah
45.	Pompa Air	2 unit
46.	Printer	58 unit
47.	Portal MPP	2 unit
48.	Rak (display)	2 unit
49.	Rak Arsip	32 buah
50.	Ruang Arsip	25 m2 & 12 m2
51.	Ruang Help Desk	12 m2
52.	Ruang Rapat	32 m2
53.	Ruang Bidang Promosi	25 m2
54.	Ruang Kepala Kantor	48 m2
55.	Ruang Pemrosesan dan Penerbitan (Back Office)	28 m2
56.	Ruang Penerimaan (Front Office)	30 m2
57.	Ruang Rapat	32 m2
58.	Ruang Tata Usaha dan Keuangan	30 m2
59.	Ruang Tunggu	30 m2
60.	Scanner	4 unit
61.	Scock lift (trolley)	2 unit

62.	Sepeda Motor	11 unit
63.	SIM Perizinan dan Jaringan internet, piranti lunak software	1 paket
64.	Sound System	1 unit
65.	Tabung PMK	12 buah
66.	Tandon/Bak air	2 unit
67.	Tempat Parkir	2 buah
68.	TV berwarna 17 inc	1 buah
69.	TV berwarna 21 inc	2 buah
70.	TV berwarna 29 inc	1 buah
71.	TV berwarna 32 inc	1 buah
72.	Wirelles	1 buah
73.	TV berwarna 55 inc	1 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2025 dalam APBD memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 5.467.805.309,-.

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 6 (Enam) program dengan 16 (enam belas) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
 1. Personil
 2. Sarana dan Prasarana
 3. Pembiayaan

D. Sistematika Penyajian Lkjip**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. Rencana Strategis**

1. Tujuan
2. Sasaran dan Indikator Kinerja

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Program dan Kegiatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

- A.1. Pencapaian Kinerja
- A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja
- A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode
RPJMD/RENSTRA
- A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
- A.5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
- A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun pencapaian kinerja

B. REALISASI ANGGARAN**BAB IV PENUTUP****A. Kesimpulan****B. Saran****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Metrik Rencana Stratejik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Misi Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan adalah

KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN

Secara tersurat Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dapat dikatakan sangat sederhana, namun kaya akan makna. Secara umum terdapat 2 (dua) poin besar dalam visi di atas yakni makna “Kejayaan” dan “Berkelanjutan”. Berikut merupakan gambaran makna utama visi Kabupaten Lamongan: Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi dengan penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin. Adapun misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.
- b. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman.
- c. Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan.

- d. Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan.
- e. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Responsif

2. Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Merujuk pada RPJMD, maka misi yang dapat didukung secara langsung yakni :

1. Misi 1 “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan”. Fokus misi ke satu adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. Representasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui Optimalisasi potensi sektor unggulan adalah meningkatnya kesempatan masyarakat, meningkatnya sektor produktif masyarakat, meningkatnya daya tarik sektor wisata daerah, meningkatnya realisasi investasi dan kemandirian desa.
2. Misi 5 “Mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Fokus misi lima adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Representasi tercapainya reformasi birokrasi yang berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif adalah meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya digitalisasi tatakelola pemerintah daerah, meningkatnya manajemen pemerintah daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mencapai visi V, maka ditetapkan tujuan terwujudnya reformasi birokrasi berdampak yang berorientasi layanan.

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025
1	Meningkatkan realisasi Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang termasuk dalam Rencana Strategis 2021-2026 masing-masing perangkat daerah. Adapun indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025
1	Meningkatkan realisasi Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik, mudah dicapai, rasional, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMA maupun PMDN
2. Meningkatnya pelayanan Perizinan;

Tabel 2.3
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Investasi Daerah baik	1. Persentase Realisasi investasi PMDN	3%

	PMA maupun PMDN	2. Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	3%
		3. Realisasi Total Terhadap Target Investasi	-
2.	Meningkatnya pelayanan Perizinan	1. Prosentase penyelesaian perizinan tepat waktu	99,71%
		2. IKM/SKM layanan Perizinan	85,11%
		3. Nilai SAKIP DPMPTSP	86,83

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang termasuk dalam Rencana Strategis 2021-2026 masing-masing perangkat daerah. Adapun indicator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Investasi Daerahbaik PMA maupun PMDN	4. Persentase Realisasi investasi PMDN	3%
		5. Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	3%
2.	Meningkatnya pelayanan Perizinan	4. Prosentase penyelesaian perizinan tepat waktu	99,71%
		5. IKM/SKM layanan Perizinan	85,11%
		6. Nilai SAKIP DPMPTSP	86,83

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal DPMPTSP	83,5	5.065.706.409,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.927.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	3.908.569.200,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Administrasi	67.012.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	1 Jenis	12.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	852.197.959,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	4 Jenis	213.999.950,00

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase peningkatan minat investasi	65,7%	14.040.000,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	35%	2.700.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Data Potensi dan Peluang Usaha	35%	11.340.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Promosi Penanaman Modal	90%	53.300.000,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	53.300.000,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam 1 tahun	3860 Izin	189.603.900,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	181.103.900,00
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik usaha yang memperoleh layanan konsultasi prizinan berusaha melalui sistem	750 Pelaku usaha	8.500.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengendalian perusahaan	67,03%	134.587.500,00
Penyelesaian	Penyelesaian	75 Pelaku Usaha	22.500.000,00

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku berbasis risiko dan pengawasan perizinan berbasis risiko usahayang megikuti bimbingan teknis/ sosialisasi Implementasi perizinan	20 pelaku Usaha	56.838.200,00
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah disanalisa dan diverivikasi data, profil dan konfirmasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan	300 perusahaan	55.249.300,00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase sata dan sistem Informasi penanaman modal	3%	10.567.500,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	65 Dokumen	10.567.500,00

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud yang nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Berikut Tabel 2.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	3%
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	3%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99,71%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil SKM	89,08
		Nilai SAKIP	86.83
		Nilai MR	74,63

Sumber data: *Perjanjian Kinerja DPMPSTP sesuai Renstra 2021-2026.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan mengacu renstra terbaru, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas berubah menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	3%
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	3%
		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	-
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99,71%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil SKM	89,08
		Nilai SAKIP	86.83
		Nilai MR	74,63

Sumber data: *Perjanjian Kinerja DPMPTSP sesuai Renstra 2025-2029.

Penetapan kinerja Tahun 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati Lamongan selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Tujuan

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KINERJA TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%	(19,42%) 2.553.956.49 5.368	115,94%

2. Capaian Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebanyak 6 (Enam) indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik	Persentase Realisasi investasi PMDN	3%	(59,77%)	115.12%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PMDN Maupun PMA			2.148.911.52 4.141	
		Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	3%	(-48,96%) 405.044.971. 227	49.55%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99,77	99,84	100,07%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SKM/IKM	85,11	89,15	104,75%
		Nilai SAKIP	86,83	88,41	102%
		Nilai Manajemen Resiko (MR)	74,64	75,24	100,8%

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

1. Realisasi Kinerja Tujuan

Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun peningkatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI	
			2024	2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	(8,02%) 2.138.626 .831.380	(19,42%) 2.553.956.49 5.368

- Indikator Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi tahun 2025 sebesar 2.553.956.495.5368 meningkat 19,42% persen dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Realisasi Kinerja Sasaran

Kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebanyak 6 (Enam) indikator terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun peningkatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI	
			2024	2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN Maupun PMA	Persentase Realisasi investasi PMDN	(-13%) 1.344.973 .209.343	(59,77%) 2.148.911.52 4.141
		Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	(82%) 793.653.6 22.032	(-48,96%) 405.044.971. 227
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99,77	99,84
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SKM/IKM	89,08	89,15
		Nilai SAKIP	88,24	88,41
		Nilai Manajemen Resiko (MR)	74,64	75,24

- Persentase Realisasi investasi PMDN tahun 2025 sebesar 2.148.911.524.141 meningkat 59,77% persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA tahun 2025 sebesar 405.044.971.227 meningkat -48,96% persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 19866/19897 meningkat 99,84% persen dibandingkan dengan tahun 2024.
- Nilai SKM/IKM tahun 2025 meningkat 89,15 persen dibandingkan dengan tahun

2024.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI 2025	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2029)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	(19,42%) 2.553.956.49 5.368	1,6%

- Indikator Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi tahun 2025 sebesar 19,42% telah melampaui target akhir periode renstra dinas. Target akhir periode sebesar 1,6% sudah terealisasi 2.553.956.495.368 atau 19,42%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 secara keseluruhan **menunjukkan capaian yang melampaui target akhir periode Renstra**, dengan catatan masih terdapat satu sasaran kinerja yang belum tercapai, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2025	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2029)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Persentase Realisasi investasi PMDN	59,77% 2.148.911.524.141	1,6%
		Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	-48,96% 405.044.971.227	1,6%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99,84	98,69
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SKM/IKM	89,15	87,23
		Nilai SAKIP	88,41	87,64
		Nilai Manajemen Resiko (MR)	75,24	74,71

- Persentase Realisasi investasi PMDN tahun 2025 sebesar 59,77% telah melampaui target akhir periode renstra dinas. Target akhir periode sebesar 1,6% sudah terealisasi 2.148.911.524.141 atau 59,77%.
- Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA tahun 2025 sebesar 405.044.971.227 telah mendekati target akhir periode renstra dinas. Target akhir periode sebesar 1,6% sudah terealisasi 405.044.971.227 atau -48,96%.
- Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 99,84% telah melampaui target akhir periode renstra dinas. Target akhir periode sebesar 98,69% sudah terealisasi 19866 atau 99,84%.
- Nilai SKM/IKM tahun 2025 meningkat 89,15 telah melampaui target akhir periode renstra dinas. Target akhir periode sebesar 87,23 sudah terealisasi 89,15.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan

Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 telah melebihi realisasi nasional, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan
Dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL 2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Melalui Pelayanan Publik Yang Inovatif	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	19,42% 2.553.956.49 5.368	12,7% 1.931,2 T

- Indikator Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi tahun 2025 sebesar 19,42% telah melebihi realisasi nasional.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 telah mendekati realisasi nasional, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan
Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL 2025
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN Maupun PMA	Persentase Realisasi investasi PMDN	(59,77%) 2.148.911.52 4.141	-
		Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	(-48,96%) 405.044.971. 227	-
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan	99,84	-

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL 2025
		Tepat Waktu		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SKM/IKM	89,15	-
		Nilai SAKIP	88,41	-
		Nilai Manajemen Resiko (MR)	75,24	-

- Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional, mengingat data realisasi nasional untuk indikator terkait belum tersedia.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi kinerja antara lain :

1. Inovasi Pelayanan Publik & Digitalisasi

Implementasi berbagai inovasi layanan perizinan menjadi faktor utama keberhasilan dalam mencapai target kinerja perizinan:

- Optimalisasi OSS RBA: Penguatan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk mempercepat proses izin.
- Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) tanpa kendala jarak dan waktu.

2. Sinergitas & Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Keberhasilan DPMPPTSP sering dikaitkan dengan peningkatan kolaborasi antar instansi di dalam MPP:

- Integrasi Layanan: Bertambahnya jumlah instansi vertikal (BUMN/BUMD) yang bergabung dalam satu atap.
- Sinergi Internal: Kerjasama antar unit kerja di DPMPPTSP dalam memantau capaian target investasi melalui data riil.
- Layanan MPP Mini berbasis digital salah satunya Upaya mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat dipelosok desa

3. Peningkatan Kualitas SDM & Tata Kelola
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK): PK tahun 2025 menjadi tumpuan akuntabilitas untuk mengukur output secara terukur sejak awal tahun.
 - Bimbingan Teknis (Bimtek): Pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mendorong kepatuhan pelaporan investasi.
 - Kualifikasi SDM: Fokus pada penyesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan fungsional untuk pelayanan yang lebih profesional.
4. Strategi Pengendalian & Promosi Investasi
 - Penyelesaian Hambatan: Aktif dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi investor di lapangan.
 - Kolaborasi promosi Investasi dengan perangkat daerah terkait melalui pameran APKASI.
 - Fasilitas forum bisnis dari Pemprov dari acara EJIF dan EJID.
 - Pelaksanaan gatering Investasi

Secara khusus factor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator prosentase peningkatan realisasi investasi tahun 2025 dipengaruhi oleh keberhasilan kebijakan hilirisasi, keseimbangan Penanaman Modal (PMDN,PMA), sentimen positif Investor dan stabilitas ekonomi, strategi inovasi, BKPM dan pengembangan infrastruktur.
2. Pencapaian Indikator Persentase Realisasi investasi PMDN tahun 2025 dipengaruhi oleh kontribusi investor domestik yang menjaga stabilitas ditengah tantangan ekonomi global.
3. Pencapaian Indikator Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA tahun 2025 dipengaruhi oleh Iklim Investasi
4. Pencapaian Indikator Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu tahun 2025 dipengaruhi oleh a. Optimalisasi OSS berbasis resiko, b. Kualitas pelayanan dan inovasi DPMPPTSP, c. Kualitas Data dan SDM, d. Faktor keputusan dan regulasi.

5. Pencapaian Indikator Nilai SKM/IKM tahun 2025 dipengaruhi oleh Kepercayaan masyarakat.
6. Pencapaian Indikator Nilai SAKIP tahun 2025 dipengaruhi oleh a. Tindak lanjut evaluasi sebelumnya, b. Komitmen pimpinan dan manajemen kinerja, c. Kualitas perencanaan kinerja, d. Pemanfaatan Teknologi Informasi, e. Estimasi anggaran dan sumber daya, f. Budaya kerja dan kolaborasi.
7. Pencapaian Indikator Nilai Manajemen Resiko (MR) tahun 2025 dipengaruhi oleh a. Kematangan tatakelola dan budaya resiko, b. Kualitas proses penilaian resiko, c. Kepatuhan terhadap regulasi, d. Teknologi dan ketersediaan sumberdaya.

1. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 Kabupaten Lamongan dalam Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Rendahnya minat investasi di Lamongan disebabkan belum tersedianya data potensi investasi yang terintegrasi disemua sektor.
2. Keterbatasan masyarakat dalam mengakases layanan perizinan.

B. Solusi

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas antara lain :

1. Menetapkan pelayanan berbasis data peta potensi Lamongan sebagai program prioritas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 melalui aplikasi SIPOLA (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Lamongan).
2. MPP Digital diarahkan untuk mengambil peran dalam edukasi dan pendamping bagi masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik berbasis elektronik pada portal pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan melalui pengintergrasian MPP Mini berbasis digital.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan berjumlah 105 orang, akan tetapi sumberdaya yang ada sekarang 53 orang, masih terdapat kekurangan 52 (lima puluh dua) orang staf PNS. Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD. maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat. Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah ialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.5.467.805.309,75- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp.4.782.596.624,- atau 87,47%, sisa dana sebesar Rp. 685.208.685,75,- yang merupakan SILPA di kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,50	98,99		5.065.706.409, 75	4.387.325.279,0 0	86,61	√	√	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		11.927.300,00	11.416.900,00	95,72	√	√	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen		5.700.000,00	5.529.800,00	97,01	√	√	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 Laporan	2 Laporan		6.227.300,00	5.887.100,00	94,54	√	√	
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	7 Laporan		3.908.569.200, 00	3.368.371.388,0 0	86,18	√	√	
Penyediaan Gaji dan	Jumlah orang yang	52 Orang	52 Orang		3.898.157.000, 00	3.357.959.188,0 0	86,14	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Tunjangan ASN	menerima gaji dan tunjangan ASN									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lapoan	1 Lapoan		5.162.200,00	5.162.200,00	100	√	√	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Lapoan	14 Lapoan		5.250.000,00	5.250.000,00	100	√	√	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	6 Administ rasi	6 Administras i		67.012.000,00	65.984.000,00	98,47	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	yang Dipenuhi									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 Paket	22 Paket		7.000.000,00	7.000.000,00	100	√	√	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	6 Paket		7.000.000,00	7.000.000,00	100	√	√	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket		14.000.000,00	14.000.000,00	100	√	√	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	3 Paket	3 Paket		12.000.000,00	12.000.000,00	100	√	√	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen		8.000.000,00	7.924.000,00	99,05	√	√	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan	5 Laporan	5 Laporan		4.012.000,00	3.130.000,00	78,02	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	tamu									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan		15.000.000,00	14.930.000,00	99,53	√	√	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	1 Jenis	1 Jenis		12.000.000,00	11.997.600,00	99,98	√	√	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit		12.000.000,00	11.997.600,00	99,98	√	√	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis		852.197.959,7	723.289.391,00	84,87	√	√	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan		194.693.958,7	156.358.991,00	80,31	√	√	
Penyediaan Jasa	Jumlah laporan	3	3 Laporan		9.000.000,00	8.995.400,00	99,95	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan		648.504.001,0 0	557.935.000,00	86,03	√	√	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis		213.999.950,0 0	206.266.000,00	96,39	√	√	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	15 Unit		26.000.000,00	23.570.000,00	90,65	√	√	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang	3 Unit	3 Unit		14.000.000,00	13.968.000,00	99,77	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	25 Unit		130.000.000,0 0	125.894.000,00	96,84	√	√	
Pemeliharaan/Rehabilita s Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		43.999.950,00	42.834.000,00	97,35	√	√	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65.7%	47.76%		14.040.000,00	13.741.000,00	97,87	√	√	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	35%		2.700.000,00	2.700.000,00	100	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	5 Dokumen		2.700.000,00	2.700.000,00	100	√	√	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Pontensi dan Peluang Investasi	35%	33,95%		11.340.000,00	11.041.000,00	97,36	√	√	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		11.340.000,00	11.041.000,00	97,36	√	√	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	98%		53.300.000,00	52.130.000,00	97,80	√	√	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan		53.300.000,00	52.130.000,00	97,80	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	4 Dokumen		53.300.000,00	52.130.000,00	97,80	√	√	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	3860 Izin	19866 Izin		189.603.900,0 0	185.811.050,00	98	√	√	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui OSS dan Sistem Daerah	2653 Izin	19709 Izin		189.603.900,0 0	185.811.050,00	98	√	√	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha		181.103.900,0 0	177.311.050,00	97,91	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Resiko Terintegrasi Secara Elektronik									
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	750 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha		8.500.000,00	8.500.000,00	100	√	√	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67,03%	68,03%		134.587.500,0 0	133.529.500,00	99,21	√	√	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	12 Bulan		134.587.500,0 0	133.529.500,00	99,21	√	√	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha		22.500.000,00	22.179.000,00	98,57	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya									
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha		56.838.200,00	56.406.200,00	99,24	√	√	
Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan	300 Perusaha an	315 Perusaha an		55.249.300,00	54.944.300,00	99,45	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha									
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman modal yang Dikelola	3%	3%		10.567.500,00	10.059.795,00	95,20	√	√	
Pengolahan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinin yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	63 Izin	63 Izin		10.567.500,00	10.059.795,00	95,20	√	√	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	65 Dokumen	65 Dokumen		10.567.500,00	10.059.795,00	95,20	√	√	

LKJIP TAHUN 2025

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									

Dari Tabel diatas diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ada Tahun 2025.

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja telah didukung 6 program 12 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal :

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, makadilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Tahun 2025 dengan alokasi anggaran pembangunan daerah adalah sebesar Rp.5.467.805.309 dan terealisasi sebesar Rp.4.782.596.624 atau 87,47%.

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Belanja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp11.927.300,- yang bersumber dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp11.416.900,- atau 95,72%, dengan sisa anggaran sebesar Rp510.400,
- b. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp. 3.908.569.200,- yang bersumber dari DAU untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 53 pegawai, Kemudian sumber dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 3.368.371.388,- atau 86,18% dan sisa anggaran Rp. 540.197.812,-
- c. Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak ada nominal alokasi dana.
- d. Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp67.012.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; dari

LKJIP TAHUN 2025

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk belanja penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi kunjungan tamu; dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp65.984.000,- atau 98,47%, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.028.000,-

- e. Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,- dipergunakan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.997.600,- atau 99,98% dan sisa anggaran Rp. 2.400,-
- f. Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp852.197.959,75,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; serta dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp723.289.391,- atau 84,87%, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dengan sisa anggaran sebesar Rp128.908.568,75,-.
- g. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp213.999.950,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, serta untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp206.266.000,- atau 96,39%, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dengan sisa anggaran sebesar Rp7.733.950,-.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Belanja Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp2.700.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan dipergunakan untuk kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp2.700.000,- atau 100%.
- b. Belanja Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp11.340.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan dipergunakan untuk kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp11.041.000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaran sebesar Rp299.000,-.

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp53.300.000,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dipergunakan untuk penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, adapun realisasi anggaran sebesar Rp.52.130.000,- atau 97,80 % dengan sisa anggaran sebesar Rp1.170.000,-.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Belanja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp189.603.900,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik, serta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp185.811.050,- atau 98,00%, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.792.850,-.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Belanja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp134.587.500,- yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha, dan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kegiatan pengawasan penanaman modal. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp133.529.500,- atau 99,21%, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.058.000,-.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp10.567.500,- yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dipergunakan untuk Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 10.059.795,- atau 95,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp507.705,-.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2021 - 2026, sedangkan untuk Rencana strategi Tahun 2025 yang harus dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yaitu misi, 5 (lima) dan misi 1 (satu), serta 6 (enam) program yang dilaksanakan melalui 16 (enam belas) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangann, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin sehingga terdapat sisa lebihdari anggaran yang tersedia.

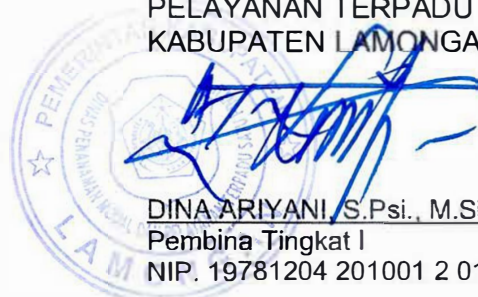
B. SARAN

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi investasi potensi unggulan daerah di tingkat nasional dan / atau internasional, serta peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola terhadap pelayanan Perizinan dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) guna memperoleh datayang akurat sesuai kondisi riil dilapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikanpetunjuk, bimbingan dan hikmat akal budi kepada kita sekalian.

Lamongan, Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781204 201001 2 011

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase realisasi investasi PMDN	3 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Prosentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3 %	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	%	35%	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	%	35%	
			Promosi Penanaman Modal		Prosentase Promosi Penanam Modal yang dilaksanakan	%	90%	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
	2. Peningkatan jumlah nilai realisasi investasi PMA	3%	Penyelenggaraan Promosi Penanam Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanam Modal Kabupaten/Koa	Kegiatan	2	
Meningkatnya pelayanan Perizinan	1. Prosentase penyelesaian peizinan tepat waktu	99,77 %	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun	Izin	3860	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai IKM/SKM	85,11	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Nilai IKM Internal DPMPTSP	Nilai	83,5	
	2. Nilai SAKIP DPMPTSP	86,83	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Nilai SAKIP	Nilai	86,83	

PENCAPAIAN KENERJA DAN ANGGARAN

SASARAN	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase Realisasi investasi PMDN	3%	2.148.911.524.141 (59,77%)	155,12%	134.587.500,- ,-	133.529.500,-	99,21%
		2. Peningkatan Jumlah nilai investasi PMA	3%	405.044.971.227 (-48,96%)	49,55%			
2. Meningkatkan pelayanan Perizinan	1. Meningkatnya pelayanan Perizinan	1. Prosentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu	99,77%	<u>19866</u> 19897	100,07%	181.103.900,-	177.311.050,-	97,91%
		2. IKM/SKM layanan Perizinan	85,11	89,15	104,75%			
		3. SAKIP DPMPTSP	86,83	88,41	102%			

PENCAPAIAN KENERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	% PENCAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TARGET EFISIENSI
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase Realisasi investasi PMDN	115,12%	99,21%	-
		2. Prosentase Realisasi investasi PMA	49,55%	99,21%	-
2. Meningkatkan pelayanan Perizinan	2. Meningkatnya pelayanan Perizinan	1. Prosentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu	100,07%	98,00%	-
		1. IKM/SKM layanan Perizinan	104,75%	97,91%	-
		2. SAKIP	102%	94,54%	-

**METRIK RENSTRA OPD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	INDIKATOR	RUMUS	2024	2025	KONDISI AKHIR
1	3	4	10	11	12
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	1. Prosentase nilai realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi PMDN tahun berjalan} - \text{jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	2,5%	3%	115,12%
	2. Prosentase nilai realisasi Investasi PMA	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi PMA tahun berjalan} - \text{jumlah realisasi investasi tahun PMA sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi PMA Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	2,5%	3%	49,55%
Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Prosentase penyelesaian izin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dg SOP dalam satu tahun}}{\text{Izin yang Masuk dalam satu tahun}} \times 100$	99,71%	99,77%	100,07%
		1. IKM/SKM Layanan Perizinan	Berdasarkan Survey IKM	89,08	89,11
	2. Nilai SAKIP DPMPTSP	Berdasarkan Penilaian SAKIP	88,24	86,83	88,41

PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN

No	Indikator Kinerja	Rumus	Tahun Dasar 2024	Target 2025		Realisasi	
				(%)	(Rp / jml)	(%)	(Rp)
1.	% Realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah realisasi Investasi PMDN s/d Tahun sekarang - jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	-13% 1.344.973.209.348	3	1.385.322.405.628	59,77	2.148.911.524.141
2.	Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi PMA	Berdasarkan nilai realisasi investasi PMA yg masuk dalam satu tahun	82% 793.653.622.032	3	817.463.230.693	-48,96	405.044.971.227
3	% Penyelesaian izin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang masuk dalam satu tahun}} \times 100$	99,71%	99,77	-	99,84	19866/19897
4	IKM/SKM Layanan Perizinan	Berdasarkan Survey SKM	89,08	-	85,11	-	89,15
5	Nilai SAKIP	Berdasarkan penilaian SAKIP	88,24	-	86,83	-	88,41

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs.HAMDANI AZAHARI,M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu pintu Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : **Dr.H.YUHRONUR EFENDI,M.B.A.,M.EK.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr.H.YUHRONUR EFENDI,M.B.A.,M.EK.

Lamongan, 23 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

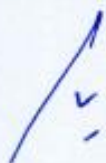
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA	1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	3%
		2. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	3%
		3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99.71%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99.71%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Hasil SKM	89,08
		2. Nilai SAKIP	88.24
		3. Nilai MR	74,63

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota	5.018.909.409,-	DAU
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14.040.000,-	DAU
3. Promosi Penanaman Modal	53.300.000,-	DAU
4. Pelayanan Penanaman Modal	189.603.900,-	DAU
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	134.587.500,-	DAU
Penanaman Modal	10.567.500,-	DAU
JUMLAH	5.421.008.309,-	

Lamongan, 23 September 2025

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN



Dr. H. YUHROHNUR EFENDI, M. B. A., M. EK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HAMDANI AZAHARI, M. M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

LAMPIRAN LAINNYA (Penghargaan)



PIAGAM PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK
KATEGORI 'ZONA HIJAU TAHUN 2024



PENGHARGAAN DARI BUPATI LAMONGAN SEBAGAI TERBAIK 3
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2025